



Strategi Penanganan Bencana Badan Sar Nasional di Kabupaten Aceh Barat

Desi Marlizar, Rahyu Dista, Nodi Marefanda

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Administrasi Negara, Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: December 02, 2022
 Revised: January 10, 2023
 Accepted: February 14, 2023
 Available online: February 24, 2023

KEYWORDS

Strategic, Disaster, Basarnas

CORRESPONDENCE

Name: Desi Marlizar
 E-mail: desimarlizar@utu.ac.id

A B S T R A C T

The aim of this research is to examine and reanalyze the implementation of the performance strategy of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) in West Aceh Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data is gathered through observation, interviews, documentation, as well as the use of audio-visual materials. Data analysis involves reduction, presentation, and drawing conclusions. Participants in this study include the Coordinator of Basarnas West Aceh, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Aceh, and community representatives. The research findings indicate that the implementation of Basarnas' strategy in disaster management in West Aceh Regency has been well executed in SAR operations. This is in accordance with clear legal foundations, namely Law Number 29 of 2014 concerning Search and Rescue, further regulated by Head of National SAR Agency Regulation Number PK. 22 of 2009 regarding SAR Operation Management. However, there are several obstacles faced by Basarnas West Aceh, including unfavorable weather conditions, challenging field conditions, and instances of unsuccessful SAR operations.

PENDAHULUAN

Indonesia sering mengalami bencana alam karena faktor-faktor seperti kondisi geografis, geologis, hidrologi, dan demografis yang rentan terhadap bencana, yang berpotensi menyebabkan frekuensi bencana yang tinggi. Zaluksu, dalam Ramadhani, M., & Ardias, W. S. (2020)., menjelaskan bahwa Basarnas (Badan SAR Nasional) merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam situasi bencana. Basarnas adalah lembaga pencarian dan pertolongan yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus terhadap negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, ini mencakup aktivitas pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban yang terkena musibah akibat bencana atau situasi berbahaya bagi nyawa manusia, seperti kecelakaan penerbangan, pelayaran, dan orang yang hilang di daratan atau perairan.

Aceh Barat, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di bagian barat, juga termasuk daerah yang rentan terhadap bencana. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat bahwa Aceh Barat mengalami 148 peristiwa bencana alam selama tahun tersebut.

Data tersebut menggambarkan jumlah peristiwa alam yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat akibat bencana. Ini menunjukkan salah satu peran dan tanggung jawab utama Basarnas dalam menangani bencana. Basarnas memiliki peran signifikan dan menjadi lembaga utama dalam mengatasi situasi bencana seperti kecelakaan penerbangan, pelayaran, orang hilang di laut/sungai, dan lainnya, dengan pelaksanaan Operasi SAR yang bertujuan untuk mencari dan mengevakuasi korban.

Miftahul Ridho (2020) melakukan penelitian yang berfokus pada Analisis Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat dalam Mengendalikan Dampak Bencana Banjir di Masyarakat Kecamatan Kaway

XVI. Selanjutnya, Anisa Khiroza dan Zikri Alhadi (2019) melakukan penelitian yang mendalam tentang Analisis SWOT Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang. Setelah itu, terdapat penelitian tentang Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam Menanggapi Periode Darurat Tsunami Selat Sunda tahun 2018 (Fitri Andrianti Indah Gustaman, Hayatul Khairul Rahmat, Joshua Banjarnahor, dan Syamsul Maafir, 2020). Tambahan pula, penelitian ini menginvestigasi Pengaruh Insentif, Pelatihan, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang (Enda Muktiani, 2019), dan penulis juga membahas kesuksesan dari Proses Komunikasi Organisasi dalam Koordinasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (Sar) di Medan Sitorus, S. S. (2018).

Selain melakukan penyelamatan korban tenggelam di laut/sungai, Basarnas Aceh Barat juga terlibat dalam menyelamatkan korban bencana alam dan bukan alam, seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan banjir, merupakan tantangan. Basarnas Aceh Barat melakukan penyelamatan dengan teknik Operasi SAR, untuk mencari korban yang mungkin hilang akibat bencana. Dalam konteks ini, strategi Badan SAR Nasional Meulaboh-Aceh Barat penting sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, penulis merencanakan penelitian lebih lanjut tentang Strategi implementasi penanganan bencana Basarnas di Kabupaten Aceh Barat.

Pembahasan ini akan mengangkat topik bagaimana Strategi Implementasi Penanganan Bencana Basarnas di Kabupaten Aceh Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

strategi penanganan bencana Basarnas di Kabupaten Aceh Barat.

Strategi atau manajemen merupakan rencana yang terstruktur dan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, termasuk dalam penanganan bencana yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional (Basarnas). Dalam konteks Tim 14 SAR, strategi menjadi rencana yang dipersiapkan saat menghadapi bencana. Basarnas Aceh Barat memiliki upaya besar dalam menjalankan Operasi SAR, dan keberhasilannya sangat tergantung pada strategi yang diadopsi dalam pelaksanaannya.

Strategi adalah suatu rencana terstruktur yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pandangan Sadisun (Anisa Khairoza, Zikri Alhadi, 2019), strategi merupakan serangkaian kegiatan yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan suatu tindakan. Manajemen atau strategi adalah suatu perencanaan yang terstruktur yang disiapkan untuk melaksanakan aktivitas tertentu, termasuk dalam konteks penanganan bencana oleh Badan SAR Nasional (Basarnas). Tim SAR memiliki kewajiban untuk merancang strategi yang akan digunakan sebagai panduan saat menghadapi bencana. Basarnas Aceh Barat memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan Operasi SAR, dan kesuksesan operasi ini sangat bergantung pada strategi yang diterapkan oleh lembaga tersebut.

Basarnas Aceh Barat menerapkan strategi operasi SAR dengan aspek-aspek berikut:

- a. Tim Koordinasi Kecil: Pembentukan tim kecil untuk memastikan koordinasi efektif dengan Basarnas Aceh Barat melalui kelompok tugas khusus.
- b. Penentuan Lokasi Kejadian: Tim SAR atau SRU merencanakan strategi pencarian yang efisien dengan menentukan lokasi kejadian secara akurat sebelum operasi dimulai.
- c. Sistem Operasi SAR: Tim dibagi menjadi kelompok kelompok selama pencarian untuk upaya yang terorganisir dan optimal.
- d. Tahapan Penanganan Operasi SAR: Lima tahap meliputi kesadaran, tindakan awal, perencanaan operasi, pelaksanaan, dan penutupan operasi. Tahapan-tahapan ini membimbing jalannya operasi.

Strategi beradaptasi sesuai medan evakuasi. Komunikasi menjadi kunci keberhasilan operasi SAR, membantu penyampaian informasi dalam proses pencarian.

Strategi yang digunakan oleh Basarnas Aceh Barat dalam operasi SAR melibatkan beberapa langkah penting, seperti pembentukan unit satgas kecil untuk koordinasi langsung, menentukan lokasi kejadian dengan kesiapan yang matang, menggunakan sistem SAR yang melibatkan beberapa tim, dan mengikuti tahapan operasi SAR yang melibatkan 5 tahapan, yaitu menyadari, tindak awal, perencanaan operasi, pelaksanaan operasi, dan pengakhiran operasi SAR.

Badan SAR Nasional memiliki peran penting dalam menangani bencana seperti kecelakaan penerbangan, pelayaran, orang hilang, dan tenggelam. Menurut Zalukhu (2013), Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pertolongan dan menyelamatkan jiwa manusia dari ancaman bencana. Oleh karena itu, respons cepat dan tanggap diperlukan dalam tindakan Badan SAR Nasional dalam merespons proses pencarian saat bencana terjadi.

Salah satu upaya penting Badan SAR Nasional (Basarnas) adalah respons cepat yang dilakukan oleh personelnya untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat. Ini dilakukan untuk mendorong kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban saat bencana terjadi serta untuk meminimalisir dampak negatif bencana. Konsep *Search and Rescue* (SAR) melibatkan serangkaian upaya mencari, membantu, dan menyelamatkan korban yang mungkin terdampak seperti kecelakaan penerbangan, pelayaran, atau bencana lainnya yang bisa menyebabkan tenggelam atau terperangkap. Prinsip ini diatur oleh Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*). Pelaksanaan Operasi SAR diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor PK: 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Operasi SAR.

Bencana didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan, bahkan bisa berujung pada kematian banyak orang, sehingga berpotensi merusak dan mengganggu kehidupan manusia. Sebuah bencana bisa terjadi secara kebetulan atau bahkan disengaja oleh pengaruh manusia, memengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis para korban. Bencana juga memicu narasi dan representasi media mengenai heroisme, kegagalan, dan kerugian yang dialami oleh mereka yang mengalami dan merespons bencana Naomi, Z. (2009). Indonesia terletak dalam zona yang rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi, yang dianggap sangat berisiko oleh United States Geological Surveys Utomo, M. H., & Minza, W. N. (2016). Wilayah ini, yang dikenal sebagai Cincin Api Pasifik, membentang di sepanjang hemisfer barat, mulai dari Chili hingga Jepang dan Asia Tenggara Israel, B. (2010). Lokasi geografis Indonesia yang terletak antara garis khatulistiwa dan iklim tropisnya, yang ditandai dengan dua musim yang berbeda, juga berperan dalam munculnya berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, siklon, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan Muhammad, A. (2013).

Selain menghadapi ancaman bencana yang tinggi, Indonesia juga menunjukkan kerentanannya yang mencolok terhadap risiko bencana. Kerentanan ini mencakup kerentanan fisik yang berasal dari integrasi yang belum lengkap dari aspek ketahanan dan keamanan dalam pembangunan infrastruktur, serta kerentanan non-fisik yang berakar pada ketidakpastian sosial ekonomi Maarif, S. (2013).

Implementasi adalah penerapan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan sistematis yang telah direncanakan. Seperti yang dijelaskan implementasi adalah tindakan yang disetujui dengan tujuan menyelesaikan masalah yang (Kadji, 2016) terjadi dengan maksud mempengaruhi tujuan tertentu. Selain itu, Charles O. Janes dalam (Kadji, 2016) menjelaskan bahwa implementasi adalah kegiatan yang mengoperasikan sebuah program utama, ditunjukkan melalui tiga aktivitas: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan (Aplikasi).

George Edward III menyoroti bahwa tantangan penting dalam administrasi publik adalah kurangnya fokus pada pelaksanaan kebijakan. Edward berpendapat bahwa tanpa pelaksanaan kebijakan yang cakup, keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak akan berhasil. Untuk mendorong pelaksanaan kebijakan yang efektif, Edward mengemukakan empat aspek fundamental yang perlu dipertimbangkan:

1. Komunikasi (*communication*): Hal ini berkaitan dengan penyebaran kebijakan dalam suatu organisasi atau kepada publik. Ini melibatkan ketersediaan sumber daya terkait

kebijakan, tanggapan dan sikap pihak yang terlibat, serta kerangka kerja entitas pelaksana.

2. Sumber Daya (*resources*): Ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia. Aspek yang sangat penting dari sumber daya adalah kemampuan pelaksana kebijakan, yang berkontribusi pada pelaksanaan yang terampil dari kebijakan.
3. Komitmen (*disposition*): Ini melibatkan kesiapan dan komitmen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*): Ini berhubungan dengan keselarasan badan birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan. Penting untuk menghindari fragmentasi birokrasi selama pelaksanaan, karena struktur semacam itu dapat menghambat pemenuhan kebijakan publik (Affrian, 2012)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah studi yang dilakukan untuk mengamati fenomena sosial yang terjadi di lapangan, sehingga membuat pengumpulan data menjadi lebih mudah dan komprehensif serta mendapatkan wawasan berharga. Moleong, Lexy J, (2007) dalam (Anisa Khironza, Zikri Alhadi, 2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah eksplorasi terhadap perilaku alami, memungkinkan gambaran yang jelas dan akurat dari data yang diperoleh melalui bahasa tertulis maupun lisan. Metode kualitatif ini sangat cocok untuk mengkaji dan menganalisis ulang masalah-masalah yang sangat mendesak, dengan tujuan akhir memfasilitasi perolehan fakta dan realitas yang autentik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang melibatkan penyajian gambaran yang komprehensif dan mudah untuk dianalisis sebagai suatu kesatuan utuh Moleong, Lexy J, (2007). Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk secara komprehensif memeriksa dan memberikan gambaran umum tentang Strategi Implementasi Penangan Bencana oleh Badan SAR Nasional di Kabupaten Aceh Barat. Subjek penelitian adalah Kepala Koordinator Pos di Meulaboh, Aceh Barat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, J.W. (2016).. yaitu:

1. Observasi: Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil konkret dari peristiwa, kejadian, dan aktivitas dalam penelitian. Peneliti juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting selama observasi.
2. Wawancara: Interaksi antara peneliti dan subjek penelitian sebagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan secara langsung di lokasi penelitian atau melalui telepon.
3. Dokumentasi: Tahap akhir pengumpulan data di mana penulis mengumpulkan dokumen seperti majalah, koran, artikel, dan konten media sosial dari penelitian.
4. Materi Audio/Visual: Data yang diperoleh dari sumber suara seperti radio, televisi, serta berupa foto dan video.

Kemudian Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data melibatkan penyederhanaan dan pengorganisasian data. Penyajian data melibatkan penyajian

informasi yang telah diolah dengan cara yang mudah dipahami. Tahap verifikasi melibatkan evaluasi hasil yang telah diproses untuk mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini fokus pada Strategi Penangan Bencana Basarnas di Kabupaten Aceh Barat yang bertujuan mengkaji dan menganalisis pelaksanaan strategi kinerja Badan SAR Nasional (Basarnas) di Kabupaten Aceh Barat Analisis dilakukan dengan menggunakan teori George Edward III dan mengacu pada indikator seperti komunikasi, sumber daya, komitmen (disposisi), dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Efektivitas implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi yang efisien. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang baik sangat penting untuk menginformasikan dan mensosialisasikan informasi yang relevan guna mendukung kesuksesan implementasi tersebut.

Dari hasil interview dengan Kepala Koordinator Meulaboh Aceh Barat Bapak Budi Darmawan, beliau menyampaikan:

“Indonesia termasuk black area, artinya lembaga yang siap dalam melakukan operasi SAR. Jika dilihat saat ini Indonesia di kategorikan sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, maka oleh karena itu Indonesia bergabung dalam organisasi black area dan membentuk Basarnas yang akan memberikan rasa aman terhadap suatu negara. Kemudian Basarnas juga mempunyai misi visi yaitu berhasil dalam pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tepat, handal dan aman. Itu adalah visi kita. Selanjutnya terkait fungsi Basarnas sendiri itu ada beberapa kategori yaitu: untuk pembinaan, pengarahan dan pengendalian potensi SAR. Lalu kita ada yang namanya pelaksanaan siaga kemudian pelaksana tidak awal operasi SAR, koordinasi-koordinasian SAR dalam pelaksanaan operasi SAR, pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dibidang SAR. Kemudian tugas Basarnas itu sendiri adalah kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang dikhawatirkan hilang atau menghadapi musibah bahaya dalam penerbangan dan pelayaran atau bencana masibah lainnya yang pelaksanaan operasi SAR nya dikoordinasikan kepada Basarnas. Selanjutnya dalam kesiapsiagaan kita juga telah membentuk Satgas unit-unit kecil yang berada di daerah-daerah yang jauh dengan Basarnas Meulaboh. Kemudian setiap adanya bencana seperti musibah orang tenggelam/orang hilang dan lainnya maka satgas tersebut langsung melakukan koordinasi kepada Basarnas Meulaboh Aceh Barat. Baru kemudian kita bersiap untuk turun ke lokasi tujuan berdasarkan laporan satgas di tempat kejadian. Proses komunikasi yang kami lakukan tentunya merupakan salah satu gambaran sekaligus menentukan strategi yang harus kami buat guna mempersiapkan pelaksanaan operasi SAR. Sebelum operasi SAR dilaksanakan terlebih dahulu kami mengkoordinasikan kepada satgas SAR dan TNI-POLRI yang ada di daerah tersebut, sehingga kami dapat mengetahui seperti apa kejadiannya dan medan lokasinya juga seperti apa. Setelah informasi tersebut telah diterima oleh SAR Meulaboh, kami segera mempersiapkan peralatan

dan langsung bergerak menuju ke titik lokasi kejadian". (wawancara 16 Juni 2021)

Proses komunikasi merujuk pada saluran komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam operasi SAR, memiliki potensi untuk menyelamatkan korban dari berbagai kejadian seperti musibah penerbangan, pelayaran, orang tenggelam, orang hilang, dan korban yang berisiko terjebak atau tidak dapat diselamatkan. Tidak hanya itu, proses komunikasi dimulai dari kantor SAR Banda Aceh. Fungsi komunikasi ini adalah untuk memberikan evaluasi yang melibatkan pertanggungjawaban atas kinerja Basarnas Aceh Barat kepada tingkat Provinsi. Bentuk komunikasi dapat menggunakan media sosial atau alat komunikasi lainnya, sehingga dapat menginformasikan perkembangan dan hambatan yang terjadi selama operasi SAR, serta kerusakan fasilitas lapangan yang tidak dapat dioperasikan kembali.

2. Sumber daya

Sumber daya memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena tanpa ketersediaan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tercatat di atas kertas. Meskipun upaya komunikasi telah dijalankan oleh Basarnas namun kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan tersebut dapat menghambat efektivitas pelaksanaan. Kekurangan ini dapat mengakibatkan hambatan dalam implementasi upaya Basarnas dalam meningkatkan pelayanan pencegahan bencana kepada masyarakat. Salah satu upaya Basarnas untuk mengatasi hal ini adalah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di POS Basarnas Kabupaten Aceh Barat. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Kepala Koordinator SAR Meulaboh saat diwawancarai.

"Sumber daya kita sejauh ini sudah memadai, walaupun tidak begitu menonjol atau lengkap bisa dikatakan. Tetapisetidaknya disaat kami melakukan operasi SAR perlengkapan tersebut alhamdulillah lengkap dan ada saat diperlukan. Hanya saja jika dilihat kekurangannya terletak pada sumber daya manusia, dimana personil kita saat ini masih sangat kurang dan kita juga membutuhkan dari lembaga lain yang paham tentang pelaksanaan operasi SAR. Seterusnya, kendala yang sering terjadi yakni kondisi cuaca alam, dimana pelaksanaan operasi SAR dapat dihentikan disaat cuaca tidak mendukung. Namun, hal ini bukanlah menjadi sesuatu kendala untuk kami tetap melaksanakan operasi SAR, karena sejauh ini kami masih tetap melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Basarnas sebagai lembaga dibidang penyelamatan". (wawancara 16 Juni 2021)

Kesuksesan pelaksanaan strategi Basarnas di Kabupaten Aceh Barat secara signifikan bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang mencukupi. Hal ini memungkinkan tim Basarnas untuk lebih efektif dalam melakukan operasi SAR di lapangan dan memberikan bantuan penyelamatan kepada para korban bencana.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada dukungan dan sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Dalam konteks ini, sikap yang dipegang oleh para pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam pendekatan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan bencana di POS Basarnas Kabupaten Aceh Barat, langkah-langkah diarahkan sesuai dengan Undang-Undang No 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue) dan bersamaan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor: PK. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Operasi SAR. Dalam proses penelitiannya, penulis juga mengobservasi tingkah laku dari staf Basarnas Aceh Barat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa para anggota Basarnas Aceh Barat telah menguasai seluruh aspek operasi SAR, sehingga hal ini berdampak positif terhadap kualitas kinerja mereka. Dalam pelaksanaan tugas ini, penting bagi mereka untuk memahami strategi, yang menjadi faktor utama dalam kesuksesan operasi SAR yang direncanakan.

"Menurut saya, saya sangat mendukung adanya Basarnas di Aceh Barat. Karena keberadaan lembaga itu dapat membantu masyarakat dan juga menjadi orang terdepan saat penanganan bencana seperti orang tenggelam dan lainnya". (wawancara 17 Juni 2021)

Di samping itu, sikap tanggap dari staf Basarnas Aceh Barat juga mencerminkan hubungan yang positif dengan masyarakat. Ketika ada individu yang perlu melaporkan insiden hilangnya seseorang atau kejadian tenggelamnya seseorang yang membutuhkan bantuan dari Basarnas Aceh Barat, para petugas Basarnas akan memberikan layanan kepada masyarakat tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi meliputi elemen-elemen seperti organisasi, pembagian tugas, interaksi antar unit di dalam organisasi, serta hubungan organisasi dengan entitas luar. Struktur birokrasi ini memiliki peranan yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Koordinator SAR mengenai dampak struktur birokrasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan penanganan bencana pada masyarakat.

"Mengenai kepengurusan strukturan diatas, ada beberapa bagian wilayah yang memang terdapat masing-masing pos SAR salah satunya di Meulaboh. Nah terkait kinerja, setiap kabupaten yang tidak ditetapkan pos SAR maka mereka akan membuat unit kecil yakni satgas SAR yang ada di kabupaten tersebut. Dengan begitu, misalkan terjadi suatu bencana maka unit satgas tersebut segera mengkonfirmasi ke pusat Basarnas". (wawancara 16 Juni 2020).

Dari pengamatan langsung dalam penelitian, struktur birokrasi yang diidentifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi SAR sejauh ini telah berhasil. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi utama Basarnas sebagai instansi penyelamatan. Meskipun demikian, penelitian juga mengungkapkan bahwa jumlah personil Basarnas Aceh Barat masih terbatas dan ada harapan untuk penambahan personil lapangan guna lebih memadai. Kondisi ini dipicu oleh berbagai kejadian bencana alam maupun insiden lainnya yang mengakibatkan personil Basarnas Aceh Barat kurang efektif dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan POS Basarnas Meulaboh dapat meningkatkan penangana bencana bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Seach and Rescue) dan bersamaan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor: PK. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Operasi SAR serta Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2016 tentang Pencarian dan Pertolongan (Seach and Rescue). Berdasarkan dari teori Edward III, kebijakan pemerintah ini dapat dilihat dari 4 indikator pelaksanaan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada tahap komunikasi POS Basarnas sudah melakukan sosialisasi tentang proses penanganan bencana kepada masyarakat. Sumber daya (Manusia, wewenang, Fasilitas dan Anggaran), yang dimanfaatkan dalam kebijakan penanganan bencana ini adalah seluruh staf SAR. Disposisi (Sikap Pelaksana) dilakukan secara berjenjang oleh setiap staf. Sesuai SOP. Sedangkan struktur birokrasi yang diambil oleh POS Meulaboh untuk memberikan layanan SAR kepada masyarakat. Pelaksanaan implementasi strategi Basarnas di Kabupaten Aceh Barat memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat dalam melakukan pengevakuasian terhadap korban musibah bencana seperti kecelakaan penerbangan, pelayaran dan orang tenggelam/hilang yang dikhawatirkan tidak selamat

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Koordinator SAR Meulaboh, staf dan jajarannya serta masyarakat Gampong Meureubo yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi terkait Implementasi strategi Penanganan Bencana Basarnas di Kabupaten Aceh Barat dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Budi, U., & Supriharjo RD. (2012). Pemintakatan Risiko Bencana Banjir Bandang di Kawasan Sepanjang Kali Sampean, Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Teknik ITS. Diakses dari 1* (Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Teknik ITS (ISSN 2301-9271), C58–C62.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Kodar, M. S. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dengan Pemerintah Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Israel, B. (2010). *Indonesia's Explosive Geology Explained*. Retrieved from <http://www.livescience.com/8823-indonesia-explosive-geology-explained.html>, diakses pada 18 Desember 2019.
- Maarif, S. (2013). *Pikiran dan Gagasan: Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdikarya. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2013). *Prosiding Workshop Nasional Praktis Cerdas Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- Muktiani, E. (2019). Pengaruh Insentif, Pelatihan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sar Semarang. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 52–62. <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.40>
- Naomi, Z. (2009). *Ethics for Disaster*. USA: Rowman & Littlefield Publisher.Inc.
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor: PK 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Operasi SAR Peraturan Perpres nomor 83 tahun 2016 tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*).
- Ramadhani, M., & Ardias, W. S. (2020). Efektivitas Pelatihan Manajemen Stres Dalam Penurunan Stres Kerja Pada Anggota Badan Search and escue Nasional (Basarnas) Kota Padang. *PSYCHE: Jurnal Psikologi*, 2(1), 28–39.
- Sitorus, S. S. (2018). *Universitas Medan Area Fakultas: Ilmu Sosial Dan Politik*. (Ramadhani & Ardias, 2020) (Muktiani, 2019)(Muktiani, 2019)Budi, U., & Supriharjo RD. (2012). Pemintakatan Risiko Bencana Banjir Bandang di Kawasan Sepanjang Kali Sampean, Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Teknik ITS. Diakses dari 1*(Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Teknik ITS (ISSN 2301-9271)), C58–C62. <http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/966>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet 21. Bandung: Alfabeta.*
- Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (*Seach and Rescue*).
- Utomo, M. H., & Minza, W. N. (2016). Perilaku Menolong Relawan Spontan Bencana Alam. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 2(1), 48-59.